

PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR TAHUN 2020

Agus Maulani¹, Novianita Rulandari^{2*}, Rahardi Pratomo³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : agusmaulani.airbus7@gmail.com¹, novianitarulandari@gmail.com²,
rahadipratomo@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax Management &
Transparency, Taxpayers'
Trust s

This research was conducted in Pratama East Tangerang Tax Service Office (KPP), and was intended to gain insight on how tax management transparency and tax equity affects taxpayers' trust. This was a quantitative research and the data was gathered through survey analysis. The research sample was taxpayers of KPP Pratama East Tangerang, from which there were 100 respondents. The data was then analyzed using multiple linear regression. The writer used SPSS 25 for this research. The results showed that Tax Management Transparency (X1) did not significantly affect Taxpayers' Trust (Y) towards KPP Pratama, East Tangerang— 21,9%— and the rest (78,1%) was affected by other factors outside the scope of this research that was not further researched by the writer. Tax Equity (X2) also did not significantly affect Taxpayers' Trust (Y) towards KPP Pratama, East Tangerang, by only 28,4%; the rest (71,6%) was affected by other factors outside the scope of this research that was not further researched by the writer. The last, both Tax Management Transparency (X1) and Tax Equity (X2) did not significantly affect Taxpayers' Trust (Y) towards KPP Pratama, East Tangerang, by only 32,7%; the rest (67,3%) was affected by other factors outside the scope of this research that was not further researched by the writer.

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber penerimaan terbesar dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). kontribusi pajak pada APBN mencapai 70% terhadap total penerimaan pada negeri atau dalam APBN-P tahun 2013 mencapai Rp 1.664.365 triliun serta tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp 2.060.365 triliun. tetapi sistem perpajakan menghadapi problem, di satu sisi semakin diandalkan sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan paling berdaya lanjut (sustainable) karena tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesejahteraan warga, berbeda dengan donasi serta utang luar negeri yang membebani serta secara politis dapat mensubordinasi, atau bergantung pada asal daya alam yang akan segera habis. Di sisi lain, sistem perpajakan menghadapi tekanan politis untuk tetap dilemahkan sebagai alat kebijakan mewujudkan keadilan sosial (laporan APBN/APBN-P: 2014).

Pendapatan negara diperoleh dari pendapatan negara asal pajak serta pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan Negara Tahun 2016 sampai 2020 dapat ditinjau bahwa presentase

penerimaan pajak didapatkan dari pendapatan negara dari pajak dibagi dengan pendapatan negara, maka di tahun 2016 sebesar 84,8%, pada tahun 2017 sebesar 85,6%, pada tahun 2018 sebesar 85,4%, di tahun 2019 sebesar 82,lima% serta tahun 2020 83,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara berasal pajak setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan serta berada diatas 50% kontribusi pajak dalam pendapatan negara.

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terjadi peningkatan setiap tahunnya. menurut surat edaran nomor SE-27/PJ/2020, wajib pajak efektif merupakan wajib pajak yang bisa memenuhi syarat objektif dan subjektif serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. berasal data diatas, bisa disimpulkan taraf kepatuhan wajib pajak orang pribadi setiap pada KPP Pratama Tangerang Timur setiap tahunnya menurun. Penerapan sistem perpajakan masih belum efektif serta masih terdapat wajib pajak yang belum sadar kewajiban pada perpajakan.

Salah satu pertanda adanya penggelapan pajak mungkin bisa kita lihat melalui tidak tercapainya sasaran penerimaan pajak. Berasal tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M. Iqbal Alamsjah pada surat keterangan elektro ANTARA, pada keterangannya dia berkata bahwa penerimaan pajak tahun 2010 meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2009. Akan tetapi penerimaan tadi tidak mencapai jumlah yang telah ditargetkan, yaitu hanya mencapai 97,4 % berasal target yang ditetapkan pada APBNP 2010. Kemanakah yang 2,6 % lagi? Apakah masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan seluruh penghasilannya ataukah terjadi perkara kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak? Bukan merupakan rahasia lagi bila terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak. salah satu model kasusnya ialah yang membuat petugas pajak Gayus Tambunan sebagai tersangka. Hal inilah yang semakin menguatkan adanya tindakan penggelapan pajak selama ini.

Rasio penerimaan pajak di KPP Pratama Timur dari memahami ke tahun masih membuktikan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan penerimaan pajak di tahun 2020 dengan 2021. Kepercayaan rakyat pada pemerintah dapat ditimbulkan oleh berbagai hal. Salah satu ciri yang membuat masyarakat akan mempercayai sebuah organisasi, contohnya pemerintah, adalah transparansi. Tahun ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memperkenalkan fitur “Alokasi Pajakmu” pada laman resmi Kementerian Keuangan Indonesia. Fitur ini dijadikan simulasi untuk menyampaikan ilustrasi atas penggunaan uang pajak rakyat dalam anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Dengan adanya fitur ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk memahami, peduli, memiliki, serta turut mengawasi aplikasi APBN yang asal berasal dana pajak. Langkah ini dinilai menjadi langkah awal pemerintah Indonesia pada membuka informasi peredaran dana pajak kepada rakyat (Harjanto, 2017). Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Pengelolaan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Tangerang Timur Tahun 2020”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Keban (2014:5) mendefinisikan administrasi publik, yaitu: “Menunjukkan bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa

atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah”.

2. **Pajak** : Definisi pajak menurut. Adriani adalah sebagai berikut: “Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum\berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.” (dikutip dari buku Mohamad Zain. 2008. Manajemen Pajak).
3. **Transparansi** : Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.
4. **Keadilan Pajak** : Menurut Mangoting sebagaimana dikutip oleh Harri Ariema (2008, halaman 20-22) Keadilan merupakan kata kunci dalam upaya pemerintah untuk memungut dana dari masyarakat (transfer of resources). Sesuai dengan asas equality (keadilan), pajak harus dikenakan secara adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.
5. **Kepercayaan Wajib Pajak** : Kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunitis. Kepercayaan yang dimaksud dalam variabel ini adalah kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap masyarakat dalam hal ini kaitannya wajib pajak kepada sistem hukum dan pemerintahan yang berada di Indonesia dan hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau malah tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Fitriana, dkk:2012).

Kerangka Pemikiran

Kerangka Teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori - teori yang mendukung permasalahan pada penelitian. Teori – teori tersebut berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian tiga variabel. Oleh karena itu, berdasarkan model analisis penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan hubungan antara Transparansi Pengelolaan Pajak dan Keadilan Pajak terhadap kepercayaan wajib pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur.

1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Pajak Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

Persepsi transparansi dana pajak adalah bagaimana pendapat dan penilaian masyarakat mengenai keterbukaan informasi 22 dana pajak oleh pemerintah. Wilkin (2009) dalam Merlo, et al. (2017) menjabarkan transparansi dalam perspektif organisasi sebagai tingkatan visibilitas dan aksesibilitas informasi yang disediakan oleh sebuah bisnis. Sejalan dengan Wilkin, Bappenas dan Depdagri (2002) dalam Boy dan Siringoringo (2009) menjelaskan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Transparansi sering dianggap sebagai hal yang penting untuk menjaga efektivitas manajemen pemerintah dan mengurangi korupsi. Transparansi dalam pemerintahan menunjukkan tingkatan pengungkapan informasi oleh pemerintah. Oleh karenanya, peningkatan transparansi dapat mengurangi terjadinya korupsi dan kejahatan oleh pemerintah, kondusif untuk menelusuri penggunaan dana pajak, meningkatkan kinerja ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Li, et al., 2017).

2. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

Putu (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan insidental sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Tipe yang digunakan ialah Penelitian Survei. Penelitian Survei adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representative yang dianggap sebagai populasi. Penelitian survei merupakan salah satu alat pengukuran yang paling penting yang banyak diterapkan dalam penelitian sosial. Dengan menggunakan metode ini tersebut diharapkan dapat mencari kolerasi antara transparansi pengelolaan pajak dan keadilan pajak terhadap kepercayaan wajib pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar $0,014 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,500 < t$ tabel $1,98472$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,949 > t$ tabel $0,98472$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti tidak dapat pengaruh X2 terhadap Y.

3. Pengujian Hipotesis ketiga (H3)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	678.306	2	339.153	23.594	.000 ^b
	Residual	1394.334	97	14.375		
	Total	2072.640	99			

- a. Dependent Variable: Kepercayaan Wajib Pajak
- b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Transparansi Pengelolaan Pajak

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $23,594 > F$ tabel $3,09$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

Pembahasan

		Transparansi Pengelolaan Pajak (X1)	Keadilan Pajak (X2)	Kepercayaan Wajib Pajak (Y)
Transparansi Pengelolaan Pajak (X1)	Pearson Correlation	1	.553**	.468**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
Keadilan Pajak (X2)	Pearson Correlation	.553**	1	.533**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Kepercayaan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	.468**	.533**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer Yang diolah SPSS 25 (2021)

Berdasarkan table output diatas, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan merujuk kepada ke-3 dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate person diatas.

- 1) Berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2-tailed): dari tabel output diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed): antara Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) dengan Kepercayaan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terhadap korelasi yang signifikan antara variable Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak. Selanjutnya, hubungan antara Keadilan Pajak (X2) dengan Kepercayaan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Keadilan

Pajak dengan Kepercayaan Wajib Pajak. Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Tangerang Timur sebesar 21,9% dan sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dalam model penelitian ini yang tidak diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak. Hal ini dengan adanya akses informasi yang dapat di lihat oleh masyarakat terkait pengelolaan penerimaan pajak. yang telah disediakan oleh pemerintah memperkenalkan fitur “Alokasi Pajakmu” pada halaman resmi Kementrian Keuangan Indonesia. Fitur ini dijadikan simulasi untuk memberikan gambaran atas penggunaan uang pajak masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya fitur ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk memahami, peduli, memiliki, dan turut mengawasi pelaksanaan APBN yang berasal dari dana pajak.

- 2) Berdasarkan Nilai r hitung (pearson Correlations); diketahui nilai r hitung untuk hubungan Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) dengan Kepercayaan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,468 > r$ tabel $0,195$, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan atau korelasi antara variable Transparansi Pengelolaan Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak. Selanjutnya nilai r hitung untuk hubungan Keadilan Pajak (X2) dengan Kepercayaan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,533 > r$ tabel $0,195$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kedua variable tersebut bersifat positif atau dengan kata lain semakin meningkatnya Transparansi Pengelolaan Pajak dan Keadilan Pajak maka akan meningkat pula Kepercayaan Wajib Pajak KPP Pratama Kota Tangerang Timur. Keadilan Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Tangerang Timur hanya sebesar 28,4% dan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dalam model penelitian ini yang tidak diteliti oleh peneliti. Hasil Penelitian Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (*self-interest*). Kepentingan pribadi merupakan dorongan atau motivasi dari dalam wajib pajak yang berhubungan langsung dengan persepsi yang akan mempengaruhi perilaku kepercayaan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan- peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh wajib pajak. Dimensi keadilan pajak terkait keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak, timbal balik pemerintah.
- 3) Berdasarkan output table 4.36 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $23,594 > F$ tabel $3,09$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) dan Kepercayaan Wajib Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Tangerang Timur hanya sebesar 32,7% dan sisanya sebesar 67,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dalam model penelitian ini yang tidak diteliti oleh peneliti

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian dan hasil analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Tangerang Timur sebesar 21,9% dan sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dalam model penelitian ini yang tidak diteliti oleh peneliti.
- 2) Keadilan Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Tangerang Timur hanya sebesar 28,4% dan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dalam model penelitian ini yang tidak diteliti oleh peneliti.
- 3) Transparansi Pengelolaan Pajak (X1) dan Kepercayaan Wajib Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Tangerang Timur hanya sebesar 32,7% dan sisanya sebesar 67,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dalam model penelitian ini yang tidak diteliti oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan Fadjar O. P. 2012. The Influence of Tax Fairness and Communicating on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable. International Journal Of Business and Social Science, Vol.3 No.21.
- Siahaan, Fadjar. 2013. The Effect of Tax Transparency and Trust on Taxpayers Voluntary Compliance. GTSF International Journal on Business Review, vol. 2, No. 3, March
- Scholz, John T and Lubell, Mark. 1998. Trust and Taxpaying: Testing Heuristics Approach to Collective Action. American Journal of Political Science; Apr 1998; 42, 2; ProQuest pg. 398.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Widodo, Widi. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung : sAlfabeta. .&Dedy Djefris. 2008. Tax Payer's Rights : Apa yang Perlu kita ketahui tentang hak-hak wajib pajak. Bandung : Alfabeta.
- Zain, M. 2010. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal

- Penelitian Oleh Madjidainun Rahma, Vol. 4, No. 1, (2019) Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta)
<http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/632>
- Penelitian Oleh Ario Irawan, Vol. 1, No. 6, (2020) Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening
<http://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/697>
- Penelitian Oleh Nadia Fajriana, Vol. 4, No. 2, (2020) Peran Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>

Penelitian Oleh Saripah, Vol. 6, No. 2, (2016) dengan Judul Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Resiko dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-filling bagi wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2015.

<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/758>

Penelitian Oleh Nurfadila, Vol. 1, No. 2, (2020) dengan Judul Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar

<http://journal.ildikti9.id/Equilibrium/article/view/407>